

ANALISIS SITUASI PENDIDIKAN BERWAWASAN GENDER DI PROPINSI JAWA TIMUR

Wahyu Widodo¹

ABSTRACT

The aim of this research is to find out gender condition in education at East Java Province. Qualitative and quantitative method is used for the research. The secondary data is got from Statistic Central Bureau (BPS) and Education and Culture Agency at East Java Province. Descriptive Analysis is used for explaining the data.

The conclusion this research is gender condition in education at East Java Province show gender disparity for women. In connection with the data then the government have to make gender policy for gender parity in education.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan nasional Indonesia sebagai wahana dan wadah pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia perlu berwawasan gender dalam artian tidak boleh mendiskriminasi jenis kelamin tertentu atau bias gender, melainkan harus ada unsur keadilan, keterbukaan dan keseimbangan gender. Hal ini sesuai dengan komitmen internasional maupun nasional yang telah menyepakati untuk menghapus kesenjangan gender dalam berbagai kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Untuk merealisasikan komitmen tersebut perlu adanya perubahan dan pembaharuan pendidikan sebagai wujud reformasi dan rekonstruksi baik dalam sistem, budaya, maupun isi (*content*), secara memadai dengan mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender.

Kesenjangan gender (*gender gap*) di bidang pendidikan khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari salah satu indikator makro kesetaraan dan keadilan gender yaitu *Gender Development Index* (GDI). Pada tahun 1998, GDI Indonesia berada pada posisi ke 90 dari 174 negara, tahun 2001 berada pada urutan ke 92 dari 146 negara. Tahun 2002 dan 2003 Indonesia berada pada ranking 91 dari 146 negara yaitu posisi paling rendah diantara negara-negara Asean, Singapura pada ranking 28, Malaysia 53, Thailand 61, Philipina 66 dan Vietnam 89.

Salah satu bentuk kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yaitu dalam masalah akses terhadap

lembaga pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah. Hasil penelitian di Propinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa kesenjangan dalam akses tersebut menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam mengikuti berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Lebih dari itu, perempuan belum mampu memainkan peran yang seimbang dibanding laki-laki dalam proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan baik melalui lembaga-lembaga formal maupun non-formal. Akibat lebih jauh, perempuan belum dapat menikmati hasil dan manfaat pendidikan untuk memberdayakan kehidupan mereka dibandingkan dengan yang telah dicapai oleh laki-laki. Kesenjangan pendidikan menurut gender, mengakibatkan perempuan yang terdiri dari setengah penduduk dunia masih merupakan segmen masyarakat yang belum diberdayakan sehingga kurang produktif untuk mengoptimalkan pembangunan bangsa Indonesia.

Masalah gender dan ketimpangan pendidikan merupakan fenomena yang saling terkait. Keterkaitan dua fenomena ini dapat diamati dari masalah ketimpangan pendidikan menurut jenis kelamin, yang secara konsisten pada dasawarsa terakhir menunjukkan perbedaan. Sebagaimana terjadi di Provinsi Jawa Timur, persentase penduduk berumur 10-44 tahun yang buta huruf laki-laki 4,6% dan perempuan mencapai 5,4% sekalipun secara total cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase perempuan yang

¹ Fakultas Peternakan-Perikanan Universitas Muhammadiyah Malang

buta huruf cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Kenyataan lain dapat dikaitkan dengan angka partisipasi sekolah (APS). Angka partisipasi sekolah (APS) di Jawa Timur, secara keseluruhan, cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 1996 hingga tahun 1999. Namun demikian, angka ini menunjukkan perbedaan, apabila dipilahkan menurut jenis kelamin, utamanya pada usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun, atau jenjang pendidikan menengah ke atas. Angka partisipasi perempuan cenderung lebih rendah pada kelompok umur 16-18 tahun (jenjang pendidikan menengah) dan 19-24 tahun (jenjang pendidikan tinggi). Keadaan bias gender dalam pendidikan ini diperkuat oleh gambaran tentang pendidikan tertinggi yang berhasil ditamatkan. Proporsi laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi perempuan, utamanya pada jenjang pendidikan SLTP ke atas. Kenyataan ini memberikan suatu gambaran bahwa akses ke jenjang pendidikan menengah dan tinggi cenderung bias gender.

Gambaran objektif tentang perbedaan pendidikan, di satu sisi, dan kesenjangan gender di lain sisi, menjadikan isu penting yang selama ini disinyalasi sekedar berakar pada masalah sosial-budaya. Tatanan sosial-budaya merupakan dasar bagi berlangsungnya struktur yang diskriminatif dan bias gender—perempuan berada pada posisi subordinat. Struktur ini menjadi penyebab timbulnya ketidakadilan gender dan ketimpangan pendidikan bagi kaum perempuan. Namun demikian, struktur yang timpang, diskriminatif dan tidak adil ini seringkali diperkuat oleh berbagai produk kebijakan (pembangunan) pemerintah. Studi yang baru-baru ini dilakukan oleh tim Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Airlangga menggunakan model *Gender Analysis Pathway* (GAP) — menunjukkan bahwa kebijakan gender dalam Proenas dan Repetada belum menjamin implementasi program pendidikan yang berwawasan gender. Karena itu, pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) menjadi wacana utama hingga kebutuhan tindakan (*action call*) di berbagai tataran kebijakan pemerintah, baik secara nasional, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

Sampai sekarang ini masalah marginalisasi dan subordinasi terhadap kaum perempuan merupakan permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara tuntas. Adanya pembagian kerja secara seksual yang membelenggu perempuan dalam sektor domestik, menyebabkan perempuan menghadapi 3 persoalan yakni : (1) kehidupan yang terbatas membuat

perempuan tidak berkembang informasinya, sehingga nampak “bodoh” dan tidak siap untuk terjun dalam kehidupan di masyarakat; (2) jenis pekerjaan yang dilakukan perempuan pada umumnya tidak dibayar (bukan sektor produksi); (3) akibat dari kedua hal tersebut menjadikan perempuan berkembang menjadi pribadi yang terbelakang dan rendah diri. Kondisi ini nampaknya cukup memberikan andil terhadap keberadaan dan keteringgalan perempuan dalam bidang pendidikan.

Disadari bahwa pembangunan bidang pendidikan di Propinsi Jawa Timur masih menunjukkan bahwa akses dan kesempatan perempuan untuk menikmati pendidikan ada kecenderungan/ gejala tertinggal apabila dibandingkan laki-laki, walaupun kebijakan dan program pendidikan tidak mengenal anti-diskriminasi gender. Hal ini disebabkan kesempatan yang timpang menurut jenis kelamin yang berimplikasi jauh terhadap ketidakadilan/ kesenjangan gender. Hubungan yang timpang ini mengakibatkan peran gender makin tereduksi, posisi perempuan makin ter subordinasi, sehingga kontribusi perempuan terhadap pembangunan semakin lemah. Berkaitan dengan isu gender ini, maka perlu dilakukan penelitian tentang analisis situasi pendidikan berwawasan gender di Propinsi Jawa Timur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi pendidikan berwawasan gender di Propinsi Jawa Timur.

- a. Meningkatkan kesempatan dan manfaat yang diperoleh melalui penghapusan diskriminasi yang sistematis terhadap perempuan dan laki-laki.
- b. Memperkecil atau bahkan menghapus kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan.
- c. Mengintegrasikan upaya untuk menindaklanjuti permasalahan dan kebutuhan strategis laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan.
- d. Mengidentifikasi serta merumuskan permasalahan gender secara jelas dalam proses kegiatan pendidikan sebagai salah satu perwujudan hak asasi manusia.
- e. Meningkatkan kepekaan dan kesadaran gender dari berbagai pihak dalam menyusun rencana kebijakan/program/ proyek/kegiatan pembangunan pendidikan.
- f. Menyusun rencana tindak lanjut dan action plan pada masing-masing jenjang pendidikan yang lebih peka gender.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Propinsi Jawa Timur, yaitu tentang pendidikan berwawasan gender. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang didukung pendekatan kuantitatif dengan menggunakan *gender oriented*. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan data terpilah. Data dalam penelitian ini diperoleh dari BPS dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.

Gender Analysis Pathway (GAP) atau Alur Kerja Analisis Gender (AKAG) dan *Policy Outlook and Plan of Action (POP)* sebagai salah satu teknik analisis gender yang secara khusus dapat diimplementasikan dalam analisis kebijakan dan perencanaan program yang responsif gender. Langkah-langkah pelaksanaan GAP untuk mengkaji kebijakan yang responsif gender adalah:

1. Analisis kebijakan responsif gender
2. Reformulasi kebijakan yang responsif gender
3. Rencana aksi/kebijakan operasional yang responsif gender
4. Pelaksanaan program
5. Monitoring dan evaluasi

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan data yang diperoleh dengan bertitik tolak penilaian yang merumuskan usulan dalam tingkat kebijaksanaan program dan proyek (analisis deskriptif).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Situasi Pendidikan Berwawasan Gender di Propinsi Jawa Timur

Dengan menggunakan *Gender Analysis Pathway and Policy Outlook and Plan of Action (GAP dan POP)* bidang pendidikan, diperoleh data dan informasi yang dapat menggambarkan situasi dan kondisi pendidikan Propinsi Jawa Timur yang cukup bervariasi selama beberapa tahun ini. Berdasarkan data, baik yang bersumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur dan Biro Pusat Statistik Jawa Timur maka diperoleh gambaran pada Tabel 4.1. sebagai berikut

Tabel 4.1.
Indeks Paritas dan Disparitas pada Indikator Pendidikan di Jawa Timur

No.	Variabel	L (%)	P (%)	IP	Disparitas
1.	Taman Kanak-kanak				
a.	Akses dan Pemerataan				
	Jumlah siswa	49.08	50.92	1.04	1.83
	APK	50.72	56.67	1.12	5.96
b.	Mutu dan Relevansi				
	Angka Lulusan	50.78	49.22	0.97	-1.57
2.	Pendidikan Dasar (SD/MI)				
a.	Akses dan Pemerataan				
	Jumlah siswa	51.51	48.49	0.94	-3.03
	APK	110.94	110.93	1.00	-0.01
	APS usia 7-12 tahun	110,93	93,47	0.84	-17.46
	Angka PSB	51.48	48.52	0.94	-2.96
b.	Mutu dan Relevansi				
	Angka DO	0.004	0.003	0.79	-0.001
	Angka bertahan	53,86	46,14	0.86	-7.72
	Angka mengulang	4.98	2.97	0.58	-2.02
	Angka putus sekolah	0,03	0,03	1.00	0.00
	Angka Lulusan	50.48	49.52	0.98	-0.96
c.	Manajemen Pendidikan				
	Jumlah guru	54.53	45.47	0.83	-9.07
	Jumlah penulis buku ajar	85,00	15,00	0.18	-70.00
	Jumlah kepala sekolah	52,53	47,47	0.90	-5.06
	Pengawas sekolah	89,00	11,00	0.12	-78.00

3.	Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs)				
a.	Akses dan Pemerataan				
	Jumlah siswa	50.81	49.19	0.97	-1.61
	APK	110.94	110.93	1.00	-0.01
	APS usia 13-15 tahun	82,29	83,53	1.02	1.24
	Angka PSB	50.89	49.11	0.96	-1.79
b.	Mutu dan Relevansi				
	Angka DO	0.004	0.003	0.86	-0.001
	Angka melanjutkan	51,00	49,00	0.96	-2.00
	Angka mengulang	0.45	0.11	0.31	-0.35
	Angka putus sekolah	1.41	1,25	0.89	-0.16
	Angka lulusan	50.71	49.29	0.97	-1.42
	Angka transisi	44,48	55,52	1.25	11.04
c.	Manajemen Pendidikan				
	Jumlah guru	60.30	39.70	0.80	-20.59
	Jumlah penulis buku ajar	87,70	22,30	0.25	-65.40
	Jumlah kepala sekolah	85,00	15,00	0.18	-70.00
3	Pendidikan Menengah Atas (SMU/MA/SMK)				
a.	Akses dan Pemerataan				
	Jumlah siswa	52.48	47.52	0.91	-4.96
	APK	57.61	57.44	1.00	-0.17
	APS usia 16-18 tahun	53,98	48,99	0.91	-4.99
	Angka PSB	52.48	47.52	0.91	-4.97
b.	Mutu dan Relevansi				
	Angka DO	0.024	0.014	0.82	-0.009
	Angka melanjutkan	52,00	48,00	0.92	-4.00
	Angka mengulang	0.83	0.18	0.20	-0.65
	Angka putus sekolah	1,00	0,61	0.61	-0.39
	Angka lulusan	52.99	47.01	0.91	-5.99
	Angka transisi	59,56	40,44	0.68	-19.12
c.	Manajemen Pendidikan				
	Jumlah guru	58.83	41.17	0.77	-17.65
	Jumlah penulis buku ajar	87,70	22,30	0.25	-65.40
4.	Pendidikan luar sekolah				
a.	Akses dan Pemerataan				
	Angka buta huruf usia 7-12 tahun	4.39	3.61	0.94	-0.78
	Angka buta huruf usia 13-15 tahun	0.92	0.36	0.29	-0.55
	Angka buta huruf usia 16-18 tahun	1.05	1.41	0.90	0.36
	Angka buta huruf usia 19-25 tahun	1.10	1.51	1.08	0.41
	Angka buta huruf usia 26-29 tahun	1.49	2.45	1.17	0.96
	Angka buta huruf usia 30-34 tahun	2.00	4.22	2.02	2.22
	Angka buta huruf usia 35-39 tahun	3.54	9.05	3.12	5.51
	Angka buta huruf usia 40-44 tahun	6.66	15.31	2.56	8.65
	Angka buta huruf usia 45-49 tahun	9.81	20.14	2.70	10.33
	Angka buta huruf usia 50-54 tahun	12.46	28.95	3.98	16.49
	Angka melek huruf	91,07	73,02	0.80	-18.05
5.	Umum				
a.	Manajemen Pendidikan				
	Kepala cabang dinas	87,50	12,50	0.14	-75.00
	Pengawas SMP, SMA, SMK	83,25	26,75	0.32	-56.50
	Penilik sekolah	89,00	11,00	0.12	-78.00

3.2. Akses dan Pemerataan Pendidikan

Indeks Paritas jumlah siswa perempuan dan laki laki cenderung menurun di bawah angka 1 sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Indeks Paritas pada tingkat TK menunjukkan kesetaraan gender, sedangkan Indeks Paritas SMA menunjukkan ketidaksetaraan gender dipihak perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan gender yang semakin tinggi di pihak perempuan.

Indeks Paritas angka IPK perempuan dan laki laki cenderung stabil di angka 1 sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi kesetaraan gender. Hanya terdapat ketidaksetaraan gender di pihak laki-laki di tingkat TK.

Indeks Paritas APS usia 7-12 tahun dan 16-18 tahun mengalami ketidaksetaraan gender dipihak perempuan. Sedangkan IP APS usia 13-15 tahun mengalami kesetaraan gender. Hal tersebut menunjukkan bahwa APS dengan usia semakin tinggi menyebabkan pergeseran menuju kearah kesenjangan gender di pihak perempuan.

Indeks Paritas angka PSB cenderung menurun di bawah angka 1 sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Indeks Paritas pada tingkat SD dan SMA menunjukkan ketidaksetaraan gender dipihak perempuan, sedangkan Indeks Paritas SMP menunjukkan kesetaraan gender. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan gender yang semakin tinggi di pihak perempuan.

Terdapat kecenderungan menarik yang dapat dilihat dalam Indeks Paritas angka buta huruf. Indeks Paritas angka buta huruf semakin terjadi kesenjangan di pihak laki-laki dengan semakin bertambahnya usia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak perempuan mengalami kejadian buta huruf yang semakin tinggi dengan semakin bertambahnya usia.

3.3. Mutu dan Relevansi

Terdapat kecenderungan menarik yang dapat dilihat dalam Indeks Paritas angka DO. Indeks Paritas angka DO cenderung stabil jauh di bawah angka 1 sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan gender di pihak perempuan, hal ini juga menunjukkan bahwa pihak laki-laki mengalami kejadian siswa DO yang lebih besar dibanding pihak perempuan.

Indeks Paritas angka bertahan pada tingkat SD menunjukkan angka jauh di bawah angka 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan gender di pihak perempuan, hal ini juga menunjukkan

bahwa pihak laki-laki mengalami kejadian angka bertahan yang lebih besar dibanding pihak perempuan.

Indeks Paritas angka melanjutkan dari tingkat SMP ke SMA cenderung menurun di bawah angka 1 sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Indeks Paritas pada tingkat SMP menunjukkan kesetaraan gender, sedangkan Indeks Paritas SMA menunjukkan ketidaksetaraan gender dipihak perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan gender yang semakin tinggi di pihak perempuan

Terdapat kecenderungan menarik yang dapat dilihat dalam Indeks Paritas angka mengulang. Indeks Paritas angka mengulang cenderung stabil jauh di bawah angka 1 sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan gender di pihak perempuan, hal ini juga menunjukkan bahwa pihak laki-laki mengalami kejadian siswa mengulang yang lebih besar dibanding pihak perempuan.

Indeks Paritas angka lulusan cenderung stabil di angka 1 sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan, tetapi menurun jauh pada jenjang SMA. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi kesetaraan gender di sebagian besar tingkatan pendidikan, tetapi pada level pendidikan menengah atas terjadi kesenjangan gender di pihak perempuan, hal ini juga menunjukkan bahwa pihak perempuan mengalami kejadian angka lulusan yang lebih kecil dibanding pihak laki-laki.

Terdapat kecenderungan menarik yang dapat dilihat dalam Indeks Paritas angka transisi. Indeks Paritas angka transisi pada tingkat SMP menunjukkan ketidaksetaraan gender dipihak laki-laki sedangkan pada tingkat SMA terjadi ketidaksetaraan gender dipihak perempuan.

3.4. Manajemen Pendidikan

Indeks Paritas jumlah guru cenderung stabil jauh di bawah angka 1 sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan gender di pihak perempuan, hal ini juga menunjukkan bahwa pihak perempuan mengalami kejadian jumlah guru yang lebih kecil dibanding pihak laki-laki.

Indeks Paritas jumlah penulis buku ajar cenderung stabil jauh di bawah angka 1 sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan gender di pihak perempuan, hal ini juga menunjukkan bahwa pihak perempuan mengalami kejadian jumlah penulis buku ajar yang lebih kecil dibanding pihak laki-laki.

Indeks Paritas jumlah kepala sekolah di tingkat SD terjadi ketidaksetaraan gender di pihak perempuan yang tidak terlalu tajam, tetapi pada tingkat SMP terjadi ketidaksetaraan gender di pihak perempuan yang sangat tajam jauh dibawah angka satu. Hal ini menunjukkan bahwa pihak perempuan mengalami kejadian jumlah kepala sekolah yang lebih kecil dibanding pihak laki-laki.

3.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesenjangan Gender Bidang Pendidikan di Jawa Timur

Bila ditelusuri lebih lanjut faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permasalahan gender di bidang pendidikan di Jawa Timur amatlah kompleks. Secara umum faktor-faktor penghambat kesetaraan gender antara lain berkaitan erat dengan:

- a. Sosial budaya masyarakat dan orangtua yang cenderung menggunakan tenaga anak perempuan untuk membantu urusan rumah tangga (beban kerja domestik).
- b. Pendidikan belum memberikan nilai tambah yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua (motivasi rendah).
- c. Masih terbatasnya daya tampung lembaga pendidikan SLTP, SLTA, PT dengan mutu baik dan biaya murah.
- d. Proses pembelajaran, bahan ajar, ilustrasi yang masih bias gender.
- e. Ekonomi keluarga yang kurang menguntungkan.

Bias gender dalam bidang pendidikan merupakan isu penting. Sebagaimana diketahui bahwa bias gender merupakan pandangan dan sikap yang lebih mengutamakan salah satu jenis kelamin dibanding jenis kelamin lainnya. Pandangan dan sikap semacam ini jika terjadi didalam pendidikan akan menjadi sebuah kebenaran yang terajarkan. Oleh karena itu, proses pendidikan seringkali dianggap sebagai media legitimasi terhadap berbagai akar persoalan gender. Lebih dari itu, bias-bias yang terjadi pada akhirnya akan mengakibatkan kesenjangan gender di bidang pendidikan.

Kesenjangan gender yang terjadi di bidang pendidikan, sangat terkait dengan adanya *stereotype*, mitos atau kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kesenjangan gender bidang pendidikan nasional yang telah dilaksanakan selama ini sebagaimana diketahui, disamping menunjukkan kemajuan, secara tidak disadri pembangunan pendidikan telah menimbulkan persoalan. Persoalan

yang terkait dengan kesenjangan gender yang cukup menonjol, antara lain (1) makin tinggi jenjang pendidikan, makin menurun angka partisipasi penduduk perempuan dibanding partisipasi laki-laki. (2) adanya studi/program yang dimitoskan cocok untuk kaum perempuan (*soft sciences*) atau hanya cocok untuk kaum laki-laki saja (*hard sciences*), (3) masih banyaknya bahan ajar yang bias gender, (4) proses pembelajaran yang dianggap melecehkan kaum perempuan, (5) belum proposionalnya kesempatan guru TK/SD perempuan untuk promosi jabatan struktural dan lain-lain. Masalah-masalah tersebut lambat laun akan menjadi salah satu sumber munculnya permasalahan dalam kehidupan sosial yang lebih kompleks.

Isu kesenjangan gender yang paling menonjol adalah sebagai berikut (1) semakin tinggi jenjang pendidikan makin lebar kesenjangan gendernya. (2) Kurangnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan dan terbatasnya pemahaman para pengelola dan pelaksana pendidikan akan pentingnya kesetaraan gender; (3) Masih terjadi gejala segregasi gender (*gender segregation*) dalam pemilihan jurusan atau program studi di Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan (4) Di daerah pedesaan anak perempuan didorong untuk menikah dan meninggalkan sekolah.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Semua indikator pendidikan yang terdapat pada akses dan pemerataan pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan dan manajemen pendidikan menunjukkan bahwa terjadi ketidaksetaraan atau kesenjangan gender di pihak perempuan. Sehingga dalam bidang pendidikan, perempuan masih menjadi pihak yang masih perlu dioptimalkan keikutsertaannya.

4.2. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya kebijakan pemerintah yang lebih adil gender sehingga keikutsertaan perempuan menjadi lebih optimal
- b. Perlunya melibatkan peran serta masyarakat ataupun organisasi massa untuk membangun pendidikan yang berwawasan gender
- c. Perlunya kelompok kerja gender bidang pendidikan untuk merumuskan langkah-langkah pendidikan berwawasan gender

- d. Mendorong kesadaran berbagai pihak untuk mewujudkan pendidikan yang berwawasan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2005. Data Pokok Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun 2003/2004. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur. Jakarta.
- Anonim, 2004. Pedoman Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup (Life Skills) Pendidikan Non Formal. Direktorat Jendral Pendidikan Sekolah dan pemuda Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Anonim, 2002. National Plan of Action: Indonesia's Education For All. National Coordination Forum Education For All. Jakarta.
- Anonim, 2002. Statistik Persekolahan (Lembaga, Kelas, Siswa, Guru dan Ruang Belajar) Tahun 2001/2002. Pemerintah Propinsi Jawa Timur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Surabaya.
- Widodo, W., 2004. Rencana Aksi Pendidikan untuk Semua Propinsi Jawa Timur Republik Indonesia 2004 – 2008. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur. Surabaya.